

Nasional

Temui MUI, Kapolri Minta
Fatwa Haram Vape Demi
Bendung Narkoba Cair.

Halaman 2

Hukum

Diduga Garap 32 Ribu Hektare
Hutan Ilegal, PT PSMI Tak
Selamat Meski Setor Rp1 T.

Halaman 5

HARIAN MERDEKA

RABU, 14 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE



NUSRON MENGHILANG, KEPALA BIN BANTAH SEMBUNYIKAN

JAKARTA | Harian Merdeka – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra membantah kabar yang menyebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di kantor BIN di tengah pengusutan dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Herindra menegaskan informasi tersebut tidak berdasar.

Halaman 11

Atasi Kemiskinan, Cak Imin Minta BUMN Buka Lapangan Kerja dan Manfaatkan Aset

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperluas peran dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya itu dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan, potensi besar BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan perusahaan negara tidak cukup diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kesempatan kerja, memperluas kegiatan usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi.

"BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat," ujar Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta BUMN memperluas akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk lulusan SMA/SMK. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.

Selain itu, orientasi pemberdayaan juga harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri.

"Kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat," katanya. ● (Egi)



Temui MUI, Kapolri Minta Fatwa Haram Vape Demi Bendung Narkoba Cair

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memperingatkan masyarakat akan ancaman serius peredaran narkotika jenis baru berbentuk cair yang diselundupkan melalui rokok elektrik atau vape.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menggelar kunjungan silaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Melihat besarnya dampak bahaya yang ditimbulkan, Jenderal Suyudi secara khusus meminta dukungan dari para ulama dan pengurus MUI Pusat untuk mengkaji serta mengeluarkan fatwa pelarangan total (haram) terhadap penggunaan rokok elektrik di Indonesia.

Jenderal Suyudi membeberkan bahwa peredaran narkotika saat ini telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi bentuk cair.

Penggunaan media vape dinilai sangat berbahaya karena kemasannya yang terselubung dan beraroma buah-buahan, sehingga sulit dibedakan dengan rokok elektrik biasa oleh masyarakat maupun petugas di lapangan.

Dia menyebut sekarang ini vape bukan hanya dipakai untuk hura-hura dengan zat kimia biasa yang juga berbahaya bagi paru-paru dan kesehatan, melainkan sudah menjadi



sarana penyalahgunaan narkotika.

"BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair," kata Kapolri.

Kapolri menambahkan, maraknya penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia merupakan bentuk perang terselubung (proxy war) yang sengaja dirancang oleh jaringan internasional untuk merusak tatanan masa depan bangsa Indonesia.

Kapolri mencontohkan sejarah kelim Perang Candu pada abad ke-19 yang sempat meruntuhkan kekuatan besar dunia akibat ketergantungan zat adiktif.

Untuk membendung ancaman tersebut, Kapolri mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang sebelumnya telah mengeluarkan langkah tegas terkait pelarangan vape.

Kapolri berharap MUI Pusat dapat menyusul

dengan menerbitkan fatwa atau rekomendasi keagamaan serupa guna memperkuat proteksi moral dan hukum bagi umat Islam di Indonesia.

"Saya terima kasih MUI Jawa Timur sudah melarang vape. Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape. Mohon dukungannya Pak Kiai, Pak Ketua, karena saya yakinkan ini adalah salah satu sumber malapetaka di era sekarang," ujar Jenderal Suyudi.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa usulan pelarangan total rokok elektrik ini telah disampaikannya secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan mendapat respons positif.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan di lebih dari 90 negara dunia, termasuk negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam yang telah melarang total operasional vape. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Ian Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Komisi II DPR RI: Rp23 Triliun Disiapkan bagi Gaji 1,4 Juta PPPK

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut pemerintah telah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembayaran PPPK menjadi perhatian, karena jumlah pegawai yang harus ditanggung mencapai sekitar 1,4 juta orang. Karena itu, mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat ke daerah perlu diperbaiki agar ketersediaan dana untuk membayar gaji tidak terkendala.

"Angkanya untuk PPPK ini istilahnya DAU, tambahan DAU itu Rp23 triliun. Untuk total mungkin 1,4 juta PPPK paruh

waktu dan PPPK penuh waktu, angka yang lumayan cukup besar," ujar Dede, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah keterlambatan penyaluran dana ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal, masih menurutnya, dana tersebut dibutuhkan Pemda untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

Gaji dan Tunjangan Guru Belum Dibayar

"Saya masih dapat banyak keluhan dari masyarakat bahwa ada guru yang gaji dan tunjagannya belum terbayarkan sejak bulan April, misalnya. Kenapa? Karena uang yang turun ke daerah agak lama," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dede mengatakan Komisi II DPR RI mendorong



Kementerian Keuangan (Kemkeu) agar mempercepat penyaluran DBH dan tambahan DAU. Dengan demikian, dana dapat diterima daerah lebih awal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK.

"Dengan konsep yang kita dorong di Kemkeu itu dibayarnya di awal. Itulah yang menyebabkan nanti proses ke depan, baik DBH maupun tambahan DAU, itu lebih awal. Karena tujuannya salah satunya dalam membayar gaji," jelasnya.

Senada dengan Dede, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penyelamatan bagi Pemda yang menghadapi

pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sementara kebutuhan belanja pegawai tetap harus dipenuhi.

"Di 2027 disediakan Rp23 triliun APBN agar PPPK guru ini bisa ditanggung oleh APBN, termasuk PPPK paruh waktunya. Tentu ini langkah, saya menilai penyelamatan karena daerah TKD-nya berkurang, (tapi) bebannya malah bertambah, jadi diambil oleh APBN," ungkap Mardani.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengaturan yang lebih berkelanjutan agar pembiayaan gaji PPPK melalui APBN, memiliki kepastian hukum dan tidak bergantung pada kesepakatan anggaran semata. ● (Egi)

Terima Surat Masyarakat Sipil, Fraksi PKB Kaji Usulan Hak Angket Gibran



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Sejumlah perwakilan masyarakat sipil menyerahkan surat kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat tersebut diserahkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Masyarakat sipil meminta Fraksi PKB menginisiasi penggunaan hak angket DPR untuk men-

elusuri persoalan yang mereka soroti, termasuk polemik ijazah Gibran dan proses pencalonannya

Perwakilan masyarakat sipil, Ray Rangkuti, mengatakan surat itu berisi permintaan agar PKB membawa aspirasi tersebut ke pembahasan di DPR.

"Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi langkah untuk mengajukan hak angket," ujar Ray.

Ray Rangkuti Soroti Polemik Ijazah Gibran

Ray menyatakan, usulan hak

angket bertujuan memperjelas persoalan yang menurutnya masih menjadi perdebatan publik terkait putusan MK dan status ijazah Gibran. Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Ray juga menyoroti pernyataan pihak-pihak yang menyebut Gibran memiliki ijazah, tetapi dokumennya belum ditemukan.

Menurut Ray, DPR dapat memfasilitasi klarifikasi agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan perdebatan.

Selain persoalan ijazah, masyarakat sipil juga meminta dugaan adanya ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran ikut ditelusuri melalui mekanisme hak angket.

PKB Terima Surat, Usulan Akan Dikaji

Fraksi PKB DPR RI menerima aspirasi tersebut melalui anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin dan Indrajaya.

Khozin mengatakan, pihaknya akan mempelajari surat beserta

berbagai usulan yang disampaikan masyarakat sipil sebelum menentukan tindak lanjut.

"Jadi, setelah pertemuan ini, kami menerima suratnya secara resmi, nantinya akan kita tindak lanjuti, akan kita bahas, lakukan pendalaman, kajian, kalkulasi, dan seterusnya," kata Khozin.

Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut. Namun, Fraksi PKB belum menyatakan keputusan untuk menginisiasi pembentukan Pansus Hak Angket.

Masyarakat Sipil Ingatkan Seleksi Anggota KPU

Dalam pertemuan tersebut, Ray juga mengingatkan Fraksi PKB agar memperhatikan integritas calon anggota KPU RI dalam proses pemilihan di DPR.

Ia menilai pengalaman Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi pelajaran penting bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Menurut Ray, integritas penyelenggara pemilu perlu menjadi pertimbangan utama agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga. ● (Egi)

Sidak Pertamina Denpasar, Anggota DPR RI Demer Minta Distribusi BBM di Bali Dipercepat



DENPASAR | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendatangi Kantor Pertamina Cabang Denpasar, Bali, Selasa (13/10/2026), untuk memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Demer melihat langsung antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan BBM pada Selasa pagi. Ia kemudian berdiskusi dengan pihak Pertamina guna mengetahui penyebab kondisi tersebut sekaligus memastikan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat.

Menurutnya, kelangkaan yang terjadi sejak pekan lalu telah menimbulkan dampak nyata bagi aktivitas masyarakat. Pembatasan atau penjatahan pasokan yang sempat dilakukan sebelumnya turut membuat antrean semakin menumpuk ketika kebutuhan BBM meningkat.

“Saya sangat prihatin melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan bensin. Dampaknya bukan hanya waktu dan tenaga yang terbuang, tetapi juga banyak masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah. Kita tahu, BBM sangat penting bagi kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat Bali,” ujarnya setelah berdiskusi dengan pihak Pertamina.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Pertamina, lonjakan permintaan BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi distribusi. Namun, Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM saat ini telah tersedia dan langkah penambahan pasokan sedang dilakukan untuk mengatasi kekosongan di sejumlah SPBU.

Jika sebelumnya pasokan terutama mengandalkan depot Manggis, kini distribusi diperkuat melalui dua titik pasokan, yakni Manggis dan Serangan. Pasokan melalui jalur laut dari Padangbai menuju Serangan juga dikerahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM di Bali. ● (Egi)

DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran Aplikasi INTI KRESNA Polrestabes Bandung



BANDUNG | **Harian Merdeka**

Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi kepolisian berbasis teknologi digital berupa peluncuran aplikasi INTI KRESNA yang diinisiasi oleh Kepolisian Resto Bandung (Polrestabes Bandung) Polda Jabar.

Peluncuran aplikasi sistem informasi kepolisian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi di Aula Mapolrestabes Bandung. Agenda peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni

Wijaya menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi INTI KRESNA merupakan langkah strategis dan proaktif dalam memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Aplikasi INTI KRESNA menjadi langkah positif dalam meningkatkan efektivitas deteksi dini. Melalui dukungan sistem informasi yang terintegrasi, potensi kerawanan kamtibmas di Kota Bandung dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat, tepat, serta terkoordinasi,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Selasa (13/10/2026).

Ia menambahkan, inovasi ini tidak hanya krusial untuk mendukung tugas operasional dan intelijen kepolisian, tetapi juga berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Kota

Bandung.

Menurutnya, pemeliharaan kondusivitas wilayah memerlukan sinergi yang kokoh antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Penggunaan teknologi modern dinilai akan semakin optimal jika diiringi dengan kedekatan hubungan antara Polri dan warga.

Aplikasi INTI KRESNA sendiri dirancang khusus untuk mendukung tata kelola informasi intelijen yang mengedepankan prinsip komprehensif, rahasia, efektif, sinergi, nyata, dan akuntabel.

Melalui kehadiran aplikasi INTI KRESNA, Polrestabes Bandung bersama Forkopimda Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan guna mewujudkan iklim Kota Bandung yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. ● (Egi)

Diduga Garap 32 Ribu Hektare Hutan Ilegal, PT PSMI Tak Selamat Meski Setor Rp1 T

JAKARTA |
Harian Merdeka

Penyerahan uang titipan lebih dari Rp1 triliun dan penyitaan 11 unit mobil tak lantas penyidikan dugaan korupsi perkebunan tebu yang menyeret PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di Kabupaten Way Kanan, Lampung, harus dihentikan.

Perusahaan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan pabrik gula yang berkasus ini, terafiliasi dengan jaringan grup usaha gula, terkait taipan Gunawan Yusuf. Pendiri sekaligus pemilik Sugar Group Companies. Dia berjuduk 'raja' gula yang kondang dengan merek Gulaku.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri dugaan penyalahgunaan pengelolaan kawasan hutan yang berkaitan dengan areal PT Inhutani V. Terbaru, penyidik memeriksa 4 saksi dari unsur Kementerian Kehutanan (Kemenhut), eks pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan, dan PT PSMI pada Senin (12/10/2026).

Pemeriksaan ini menunjukkan penyidikan masih berlanjut untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara, meskipun perusahaan telah menyerahkan uang titipan yang disebut sebagai pengganti kerugian negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, empat saksi yang diperiksa masing-masing berinisial BS dan BR dari Kementerian Kehutanan, L yang merupakan pensiunan Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan periode 2006 - 2015, serta V



dari PT PSMI.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pembekasan dalam perkara dimaksud," kata Anang, Selasa (13/10/2026).

Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

PT PSMI Serahkan Dana Titipan Rp1 Triliun

Dalam penanganan perkara ini, PT PSMI telah menyerahkan uang titipan sekitar Rp1,003 triliun dan 166.000 dolar AS. Dana tersebut ditempatkan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jampidsus.

Penyidik juga telah menyita 11 unit kendaraan roda empat serta menyegel aset berupa lahan dan pabrik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Meski demikian, penyerahan uang titipan tidak otomatis menghentikan penyidikan. Penyidik masih harus mendalami rangkaian perbuatan yang diduga melawan hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta kaitannya dengan potensi kerugian negara.

Besaran uang yang telah diserahkan juga perlu dibedakan dari penetapan

akhir kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana. Hal-hal tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.

Begini Konstruksi Kasusnya

Kasus ini berawal dari dugaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan tebu oleh PT PSMI di areal PT Inhutani V.

Perusahaan tersebut diduga membuka dan mengelola lahan sekitar 32.375 hektare sejak 2007. Lahan yang dipersoalkan disebut berada di luar areal yang tercakup dalam izin sah dari PT Inhutani V, seluas 55.157 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996.

Salah satu aspek yang dialami penyidik adalah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kemitraan antara PT Inhutani V dan PT PSMI yang dibuat pada 2013.

MoU tersebut disebut berlaku surut sejak 2007 setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberlakuan surut itu menjadi bagian dari dugaan perbuatan melawan hukum yang diselidiki Kejagung. ● (Egi)



KPK OTT di BNPB: Sestama Ditangkap, Uang Rp1,4 M dan Emas Disita

JAKARTA | Harian Merdeka

KPK mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar hingga logam mulia emas.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar jubiir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Budi belum merinci pecahan mata uang Rp 1,4 miliar yang disita. Sedangkan untuk logam mulia terdiri dari emas batangan serta tabungan emas.

"Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih proses hitung," jelas Budi.

KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB. Sekretaris Utama (Sestama BNPB) Rustian turut diangkut KPK dalam OTT.

"Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta," tambahnya.

Budi mengatakan OTT KPK pada hari ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Duduk perkara belum diungkap KPK secara utuh dan lengkap.

"Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," imbuhnya.

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.

BNPB Hormati OTT KPK

BNPB menghormati operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menyangkut lembaganya. BNPB mendorong agar asas praduga tak bersalah tetap dipenuhi. ● (Egi)

Polres Malang Gagal Peredaran 49 Gram Sabu di Turen, 2 Pelaku Ditangkap

JAKARTA |
Harian Merdeka

Satresnarkoba Polres Malang meng-gagalkan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dua pria ditangkap di sebuah rumah kontrakan beserta barang bukti puluhan paket sabu siap edar dengan berat total 49,56 gram.

Kedua pelaku berinisial S (33) dan AR (20), yang merupakan warga Kecamatan Bantur, ditangkap pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Langsep, Dusun Krajan, Desa Kemulan, Kecamatan Turen.

Kapolres Malang AKBP Rulian Syaury mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai maraknya dugaan transaksi dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Kemulan.

"Alhamdulillah, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang segera kami tindaklanjuti dengan penyelidikan," kata Rulian, Selasa (13/10/2026).

Petugas kemudian mengamankan dua orang di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Turen. Saat pengeledahan di lokasi, petugas menemukan puluhan paket sabu seberat 49,56 gram yang dikemas dalam berbagai media, mulai dari plastik klip transparan, potongan sedotan, hingga tabung kecil yang diberi kode warna.

Selain barang haram tersebut, polisi menyita dua unit timbangan elektronik, ratusan plastik klip kosong dan tabung kecil, alat isap sabu (bong), dua buku catatan rekapitulasi penjualan, serta sejumlah ponsel milik para pelaku untuk kepentingan pengusutan.

"Selain sabu, kami mengamankan timbangan, alat pengemasan, buku catatan, dan telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut akan diperiksa untuk mendalami dugaan aktivitas peredaran narkoba," jelas Rulian.

Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Malang dan dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP. Penyidik masih mendalami jaringan peredaran yang menaungi kedua tersangka.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen jajaran Polres Malang dalam menindaklanjuti arahan terbaru Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kapolri memerintahkan seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia untuk semakin mengencangkan pemberantasan narkoba sebagai respons tegas atas tren peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat. ● (Egi)



Polda Metro Jaya Kembali Sikat 30 Lapak Narkoba dan Sita Senjata di Kampung Ambon



JAKARTA |
Harian Merdeka

Polisi menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Polisi membongkar 30 lapak yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Nasriadi mengatakan puluhan lapak yang dibongkar tersebar dari pintu masuk Kompleks Permata hingga area utama di tepi kali. Di sisi kiri kawasan tersebut terdapat saluran air atau kanal yang menjadi salah satu penanda lokasi lapak-lapak itu berdiri.

"Kurang lebih ada 30 lapak yang kita bongkar, mulai dari pintu masuk sampai ke bagian utama di pinggir kali," kata Nasriadi dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Nasriadi mengungkapkan terdapat pola kerja sama antara pihak yang diduga mengedarkan narkoba dan pihak yang menyediakan lapak. Bandar narkoba, kata Dia, tidak selalu menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba.

Sebaliknya, ada pihak lain yang menyediakan lapak dan diduga menyewakannya kepada pengguna. Dengan adanya lapak, pembeli narkoba diduga tidak hanya melakukan transaksi, tetapi juga bisa mengonsumsi barang tersebut di lokasi.

"Jadi, ada bandar yang tidak menyediakan tempat, kemudian ada pemilik lapak yang menyediakan tempat. Mereka berkolaborasi sehingga pembeli bisa langsung menggunakan narkoba di tempat," jelasnya.

Dugaan praktik penyewaan tersebut menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam penertiban. Keberadaan lapak itu mempermudah berlangsungnya aktivitas penyalahgunaan di kawasan itu.

Setelah dilakukan penertiban, seluruh lapak liar yang menjadi sasaran operasi diratakan dan dihancurkan. Hal ini untuk menghilangkan tempat yang diduga digunakan sebagai sarana penyalahgunaan narkoba.

Nasriadi menyebut jajaran Polres Metro Jakarta Barat, polsek setempat, Bhabinkamtibmas, Satpol

PP, serta pengurus warga akan melakukan patroli direncanakan dilakukan secara intensif selama 24 jam untuk memantau kondisi kawasan setelah penertiban. Pengawasan diharapkan dapat mendeteksi apabila ada pihak yang mencoba kembali mendirikan lapak narkoba lagi.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Bismo Teguh Prakoso, sebelumnya mengatakan sebanyak 160 personel dikerahkan dalam proses penggerebekan. Polisi menyita barang bukti narkoba.

"Barang bukti yang diamankan sabu 20,66 gram, cangklong 16 buah," kata Kombes Bismo, Selasa (13/10).

Selain itu, polisi menyita airsoft gun hingga senjata tajam. Barang bukti tersebut sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya.

"Airsoft gun 2 buah, senjata tajam 12 buah, timbangan digital 13 buah, satu karung plastik klip kosong, korek api 500 pieces, 4 buku catatan hasil jualan, alat isap sabu (bong) 36 buah, 8 sendok sabu," jelasnya. ● (Egi)

Kantongi Bukti Sianida Bebas di Lebak, Aktivis Desak Polda Banten Bertindak



LEBAK | **Harian Merdeka**

Aliansi Social Justice menyoroti tajam maraknya aktivitas tambang emas ilegal (gurandil) serta bebasnya peredaran bahan kimia berbahaya jenis Sianida (CN) di wilayah Lebak Selatan.

Berdasarkan hasil investigasi dan advokasi mendalam yang dilakukan tim Aliansi Social Justice selama kurang lebih satu bulan terakhir, ditemukan indikasi kuat jaringan distribusi bahan kimia berbahaya yang beroperasi secara terstruktur di beberapa titik vital, mulai dari Kecamatan Malingping hingga Cibeber.

Ketua Aliansi Social Justice, Aswari, mengungkapkan bahwa dari penelusuran di lapangan, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat menjadi pemasok utama (distributor) sianida serta penyedia fasilitas pengolahan emas ilegal tersebut.

"Dari informasi dan advokasi yang kami himpun selama satu bulan ini, kami menemukan indikasi kuat keterlibatan beberapa

figur kunci. Di kawasan Malingping, distributor sianida dikenal dengan sapaan H. Pai. Sementara untuk wilayah Cibeber, muncul nama H. Dadi dan Madsari yang akrab disapa Bos Alu," ujar Aswari.

Lebih lanjut, Aswari menjelaskan bahwa Bos Alu diduga merupakan pemilik lahan pengolahan emas ilegal di kawasan Neglasari, Cibeber, Lebak, Banten, yang menyewakan lapaknya kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI).

Aliansi Social Justice menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar asumsi semata. Pihaknya telah mengumpulkan berbagai alat bukti yang menguatkan dugaan praktik ilegal tersebut.

"Kami tidak asal bicara. Aliansi Social Justice telah mengantongi bukti transaksi berupa transfer pembayaran serta dokumentasi foto/video lokasi dan rekaman aktivitas penambangan serta distribusi bahan kimia di tempat kejadian," tegasnya.

Desak Polda Banten Ambil Langkah Hukum Tegas

Maraknya penggunaan

bahan kimia berbahaya jenis Sianida (CN) secara bebas tanpa standar keamanan baku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Lebak Selatan dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Social Justice mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Banten, untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas jaringan peredaran sianida serta pengolahan emas ilegal ini.

"Kami meminta dengan tegas kepada Polda Banten untuk segera turun ke lapangan dan melakukan tindakan hukum yang cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada pembiaran terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hukum ini," pungkas Aswari.

Aliansi Social Justice berkomitmen untuk terus mengawal isu lingkungan dan penegakan hukum ini demi keselamatan masyarakat serta kelestarian alam di wilayah Lebak Selatan. ● (Egi)



Sarat Rekayasa BAP, LBH Peradi Kecam Tuntutan 1 Tahun Penjara Gabriel

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Hukum kembali dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rasa keadilan masyarakat terusik setelah Gabriel Lumbantoruan, seorang buruh pabrik di Cikarang Bekasi, dituntut hukuman 12 bulan penjara dan denda Rp20 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). LBH Peradi Profesional selaku Tim Kuasa Hukum memprotes keras tuntutan tersebut karena dinilai sebagai bentuk pemaksaan perkara yang mencederai hati nurani dan rasa keadilan publik.

Tuntutan berat ini menjadi ironi besar karena sepanjang persidangan bergulir, tidak ada satu pun alat bukti sah yang mampu membuktikan Gabriel bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas). Kasus yang menjerat buruh pabrik ini terkesan dipaksakan tanpa dasar hukum yang kuat.

Ketimpangan hukum ini semakin benđerang setelah dua ahli yang dihadirkan di persidangan—Ahli Meteorologi Legal dan Ahli Hukum Pidana—secara bulat menyatakan hal yang sama. Kedua ahli menegaskan bahwa perkara pengisian gas portable ini bukan ranah pidana, melainkan persoalan administratif yang wajib diselesaikan lewat jalur pembinaan, bukan dengan menjebloskan rakyat kecil ke jeruji besi.

"Kami sangat keberatan dan protes keras. Fakta persidangan dengan terang benđerang menunjukkan klien kami tidak pernah melakukan penyalahgunaan minyak dan gas. Bahkan, Gabriel terpaksa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Majelis Hakim karena isinya sarat rekayasa dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Sungguh kejam jika nasib seorang buruh yang mencari nafkah harus dikorbankan oleh penegakan hukum yang dipaksakan seperti ini," ujar Juhari Siahaan, S.H., M.H., perwakilan Tim Kuasa Hukum Gabriel dari LBH Peradi Profesional. ● (Egi)

RALINE SHAH MUNDUR DARI JABATAN STAFSUS MENKOMDIGI

JAKARTA |
Harian Merdeka

Jakarta - Selebritas Raline Shah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Menkomdigi. Diketahui, bintang film 5CM itu menyandang jabatan itu sejak 13 Januari 2025.

"Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengabdikan," ujar Raline dalam dikutip CNN Indonesia, Selasa (13/10/2026) malam.

"Ini merupakan pengalaman yang sangat berarti,

dan saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya dalam perjalanan profesional saya," sambung perempuan berlatar belakang aktris dan model tersebut.

Dalam keterangannya, Raline mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Menkomdigi Meutya Hafid atas kepercayaan yang sudah diberikan selama ini.

Ia menambahkan keputusan ini bukanlah hal mudah. Keputusan ini diambil usai pertimbangan beberapa komitmen profesional, salah satunya kelanjutan karier di dunia hiburan.

Diketahui pengunduran diri pemain film 99 Cahaya di Langit Eropa tersebut efektif pada 13 Oktober 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid

dalam siaran pers yang sama memberikan apresiasi atas kontribusi Raline Shah selama ini.

"Kami mengapresiasi kontribusi Raline selama menjalankan tugasnya di Kementerian dan menghormati keputusannya untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya," ujar Meutya.

"Kami tetap berterima kasih atas dukungan Raline terhadap agenda transformasi digital Indonesia," sambungnya.

(dth)



Masuk 10 Besar BUMN Layanan Terbaik, Pegadaian Tempati Posisi Ke-8

JAKARTA | **Harian Merdeka**

PT Pegadaian menempati peringkat ke-8 dalam daftar 10 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan layanan terbaik pada ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pencapaian ini menempatkan Pegadaian di antara entitas BUMN dengan penilaian pengalaman pelanggan atau customer experience (CX) terbaik. Ajang CX100 merupakan inisiatif Danantara Indonesia untuk mengukur kualitas transformasi layanan di lingkungan BUMN.

Pegadaian menyebut pencapaian tersebut didukung upaya peningkatan kualitas layanan di berbagai titik interaksi nasabah, baik melalui jaringan kantor cabang maupun kanal digital. Sejumlah layanan yang dikembangkan perusahaan antara lain aplikasi Tring! by Pegadaian dan ATM Emas Pegadaian.

Selain itu, layanan pusat kontak atau contact center Pegadaian juga meraih 10 penghargaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kualitas pelayanan dan pengalaman nasabah.



Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengatakan peringkat tersebut merupakan hasil dari kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ia menyebut pencapaian itu menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

"Pencapaian peringkat ke-8 BUMN Layanan Terbaik ini lahir dari kepercayaan, dukungan,

dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Damar.

Ia menambahkan, Pegadaian akan terus mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memperkuat pelayanan dengan semangat #MelayaniSepenuh-Hati.

Di sisi lain, Pegadaian juga memperkuat standar operasional untuk layanan penyimpanan emas. Perusahaan menyatakan

telah meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan kustodi, yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas penyimpanan emas atau vault.

Pegadaian menyatakan akan terus mengembangkan layanan dan memperluas jangkauan operasional guna mendukung inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Egi)

Iklan Mini Merdeka

Pasang Iklannya Disini...!

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA

LOWONGAN KERJA

- Staff Administrasi
- Sales Marketing
- Kurir / Driver
- Operator Produksi

Kualifikasi :

- Pria/Wanita
- Usia 18 - 35 tahun
- Pendidikan min. SMA/SMK
- Disiplin & Bertanggung Jawab

RUMAH DIJUAL
SIAP HUNI • LOKASI STRATEGIS

LT 90 m² | LB 70 m²
2 Kamar Tidur
1 Kamar Mandi
SHM • Akses Kendaraan

Harga Rp 650 Juta (Negotiable)

RUMAH DISEWAKAN

3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
Ruang Tamu & Dapur
Lingkungan Aman & Nyaman
Area Kallider - Jakarta Barat

Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAVLING DIJUAL

Luas mulai 100 - 500 m²
Akses jalan lebar
Lokasi strategis
SHM / Sertifikat

Harga Mulai Rp 3,5 Juta/m²

RUKO DIJUAL
COCOK UNTUK USAHA

LT 80 m² | LB 160 m²
2 Lantai
Lokasi ramai
Akses mudah

Rp 1,8 Miliar (Negotiable)

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN

Lokasi Premium
Fasilitas Lengkap
Keamanan 24 Jam
Dekat Pusat Kota

Harga Mulai Rp 450 Juta

MOBIL BEKAS BERKUALITAS

Toyota Avanza 2022

- Automatic
- Kondisi istimewa
- Pajak hidup
- Siap Pakai

Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA

Honda Beat 2023

- Surat Lengkap
- Kondisi Mulus
- Pajak Hidup
- Siap Pakai

Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS

- Cash & Kredit
- Proses Cepat
- DP Ringan
- Banyak Pilihan Unit

TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL
SERVIS - SPAREPART - TUNE UP

Oil Change • Tune Up • Rem • AC Mobil • Kelirisan

SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS MOBIL - MOTOR

- Suku Cadang Original & Aftermarket
- Harga Terbaik
- Tersedia Berbagai Merek

AYO SHOLAT JUM'AT
DI MASJID JAMI' AL IKHLAS

MASJID TRANSIT 24 JAM
Test-uka untuk Umum

UNDANGAN TERBUKA MAKAN NASI KEBULI MAKLUBAN GRATIS 150 PORSI

SETELAH SHOLAT JUM'AT

- Pelatih Berprestasi
- Berprestasi Berprestasi
- Keberhasilan
- Masih masuk Syurga

DONASI INFAQ

0821-1113-1236
0878-1764-8552

Sambut Kapolda Baru, Gubernur Sulteng Perkuat Sinergi Pemda dan Kepolisian

PALU | **Harian Merdeka**

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Selasa 13 Oktober 2026. Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

Irjen Pol. Rizal Irawan resmi menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah sejak 2 Oktober 2026. Kehadirannya diharapkan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban



masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Sinergi kedua institusi dinilai penting untuk menciptakan stabilitas daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pro-

gram pembangunan di Sulawesi Tengah.

“Sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan dae-

rah demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, damai, dan sejahtera,” jelasnya.

Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Polda Sulteng diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian, upaya menjaga situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan demi mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

● (Egi)

Krisis Kepercayaan, Ketua GP Ansor Kota Bogor Didesak Mundur oleh Pengurus



KOTA BOGOR |
Harian Merdeka

Dinamika internal di tubuh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Bogor dinilai kian memuncak dan membutuhkan penyelesaian serius.

Di tengah meningkatnya ketegangan internal, Wakil Sekretaris PC GP Ansor Kota Bogor, Nur Isman Iskandar, secara terbuka mendesak Ketua PC GP Ansor Kota Bogor untuk mempertimbangkan pengunduran diri demi mengakhiri kebuntuan serta menyelamatkan soliditas organisasi.

Nur Isman menilai, kepe-

mimpinan dalam organisasi kader tidak cukup hanya berpegang pada posisi formal, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan menyatukan seluruh elemen.

“Kalau kepercayaan sudah hilang dan kepemimpinan justru melahirkan ketegangan di internal, maka harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi. Jangan mempertahankan jabatan dengan mengorbankan organisasi,” tegas Nur Isman Iskandar dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (13/10/2026).

Bukan Sekadar Perbedaan Pendapat

Menurut Nur Isman, dinamika yang berkembang saat ini tidak seharusnya dianggap sebagai perbedaan pendapat biasa. Ia menyebut perbedaan dalam organisasi adalah hal wajar, namun menjadi masalah ketika bereskalasi menjadi ketegangan yang mengganggu soliditas kader.

“Berbeda pendapat itu biasa.

Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tidak lagi dikelola sebagai dinamika organisasi, tetapi berubah menjadi ketegangan dan saling berhadapan. Dalam kondisi seperti itu, kepemimpinan harus dievaluasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, situasi internal tak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga membuat para kader berada dalam posisi yang saling berhadapan.

Jabatan Amanah, Bukan Milik Pribadi

Nur Isman mengingatkan bahwa jabatan pimpinan merupakan amanah organisasi dan bukan hak pribadi yang harus dipertahankan dengan segala cara.

“Jabatan itu amanah, bukan milik pribadi. Ketika seorang pemimpin sudah tidak mampu membangun kepercayaan dan soliditas, maka mengundurkan diri secara terhormat bukan sebuah kekalahan. Justru itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab

terhadap organisasi,” katanya.

Ia menegaskan, pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Jangan sampai kepentingan mempertahankan posisi justru lebih besar daripada kepentingan menyelamatkan organisasi,” ucap Nur Isman.

Buka Ruang untuk Kepemimpinan Baru

Nur Isman secara tegas mendorong lahirnya kepemimpinan baru apabila kondisi internal sudah tidak memungkinkan untuk membangun kembali kepercayaan.

“Kalau seorang ketua sudah tidak mampu menyatukan pengurus dan kader, saya kira harus berani memberikan ruang kepada kepemimpinan baru. Organisasi tidak boleh berhenti hanya karena seseorang ingin mempertahankan jabatan,” tegasnya.

● (Egi)

Leonardo DiCaprio Buka Suara Soal Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aktor asal Amerika Serikat, Leonardo DiCaprio, baru-baru ini menjadi sorotan publik Tanah Air. Hal ini bermula setelah DiCaprio mengungkapkan keprihatinannya tentang bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Dalam unggahan di Instagram miliknya, DiCaprio mem-posting video yang menyoroti lebih dari 800.000 hektare lahan hutan telah hangus dilalap si jago merah. Peraih Oscar ini juga menulis tentang beragam penyebab karhutla, termasuk krisis iklim.

"Lebih dari 2 juta acres atau ekar (800.000 hektare) hutan telah terbakar di pulau Kalimantan dan Sumatra," tulis DiCaprio, di Instagram @leonardodicaprio.

"Perubahan iklim membuat hutan di Kalimantan menjadi lebih kering, lebih panas, dan lebih rentan terhadap kebakaran yang sering kali dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan hutan untuk pertanian. Saat lahan gambut yang kaya karbon seperti ini terbakar, lahan tersebut juga melepaskan karbon tersimpan dalam jumlah sangat besar, sehingga semakin memperparah krisis iklim dan keanekaragaman hayati," sambungnya.

DiCaprio tak lupa menyoroti tentang dampak karhutla ini pada jutaan orang. Tak hanya itu, ia juga mengungkap dampaknya pada orang utan yang



ada di Borneo, Kalimantan.

"Lebih dari 5 juta orang telah terpapar asap kebakaran hutan. Orang utan Kalimantan terlihat melarikan diri dari hutan yang terbakar seiring hilangnya habitat mereka," ujar DiCaprio.

"Orang utan ini diselamatkan oleh BKSDA di Kalimantan Tengah dengan dukungan BOS Foundation, dan kini berada dalam perawatan dokter hewan. Owa Kalimantan (Bornean White-bearded Gibbon), yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pepohonan, memiliki sedikit pilihan untuk melarikan diri saat api melalap hutan di sekitarnya."

Dalam postingan ini, DiCaprio mencantumkan tautan tentang karhutla dan dampaknya pada orang utan di Borneo. Tautan ini juga berisi bentuk dukungan yang bisa diberikan banyak orang untuk upaya pemadaman kebakaran demi melindungi hutan dan satwa liar.

Leonardo DiCaprio adalah aktivitis lingkungan dan perubahan iklim

Di balik dunia akting, Leonardo DiCaprio memang

dikenal sangat peduli dengan lingkungan dan isu krisis iklim. Pada tahun 2014, ia pernah ditunjuk sebagai perwakilan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perubahan iklim.

Sekretaris Jenderal PBB yang menjabat saat itu, Ban Ki Moon, mengatakan bahwa ketenaran global sang aktor sangat cocok dengan tantangan global yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Jauh sebelum terpilih sebagai perwakilan PBB, DiCaprio sudah menjadi aktivitas lingkungan, Bunda. Pada tahun 1998, DiCaprio yang masih berusia 24 tahun mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS saat itu, Al Gore.

Dilansir laman Together Band, pertemuan tersebut secara khusus membahas pemanasan global. DiCaprio menyebut pertemuan itu sebagai momen penting yang menjadi tonggak awal kiprahnya dalam aktivisme iklim.

Di tahun yang sama, DiCaprio mendirikan Leonardo DiCaprio Foundation (LDF). Misi awal yayasan ini adalah untuk melindungi kawasan alam

liar di Bumi serta mencari cara untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara umat manusia dan alam. Yayasan tersebut diketahui telah mendukung banyak proyek konservasi inovatif di seluruh dunia yang berfokus pada perlindungan ekosistem yang rentan dan spesies-spesies penting.

Selain itu, DiCaprio dan yayasannya juga telah menghasilkan sejumlah proyek media yang mengkomunikasikan urgensi perubahan iklim kepada publik, seperti *The 11th Hour* pada tahun 2007 dan *Before the Flood* di tahun 2016. Kedua karya tersebut telah ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Saat menerima penghargaan Aktor Terbaik di Piala Oscar 2026 untuk film *The Revenant*, DiCaprio memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyuarakan isu-isu perubahan iklim. Ia meminta dukungan dari semua orang untuk melindungi planet Bumi dari ancaman krisis iklim, Bunda.

"Kita perlu mendukung para pemimpin di seluruh dunia yang tidak berbicara demi kepentingan pihak pencemar besar atau perusahaan raksasa, melainkan berbicara demi seluruh umat manusia, demi masyarakat adat di dunia, demi miliaran orang kurang mampu yang akan paling terdampak oleh hal ini, demi anak-cucu kita, serta demi mereka yang suaranya telah tenggelam oleh politik keserakahan," kata sang aktor dalam pidatonya. ● (Egi)

NUSRON MENGHILANG

Di sisi lain, KPK mengaku belum mengetahui keberadaan Nusron. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih berharap politikus Partai Golkar itu bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami belum mendapat informasi soal keberadaan yang bersangkutan. Namun kami meyakini kepada NW (Nusron Wahid) ataupun pihak-pihak lain tentunya akan kooperatif dalam proses penegakan hukum perkara ini," ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2026)

KPK menilai keterangan Nusron penting untuk membantu penyidik menyusun gambaran utuh perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Karena itu, penyidik telah mengirimkan surat panggilan dan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Nusron pada pekan ini.

Sebelumnya, Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026) dengan alasan memiliki agenda dinas. KPK kini kembali mengadakan pemeriksaan untuk mendalami perkara tersebut.

Kasus yang tengah diselidiki berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan izin pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang melibatkan pengembang PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai

tersangka. Mereka berasal dari kalangan pejabat kementerian dan pihak swasta, termasuk empat orang kepercayaan Nusron yang diduga berperan sebagai pengepul aliran dana suap.

Bantahan Kepala BIN mengenai keberadaan Nusron muncul ketika KPK masih berupaya memperoleh keterangannya untuk mengusut perkara tersebut. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, keberadaan Nusron belum diketahui oleh penyidik. ● (Egi)

HASIL DENMARK OPEN 2026: UBED DAN RAYMOND/ JOAQUIN KANDAS DI BABAK PERTAMA

JAKARTA |
Harian Merdeka

Moh Zaki Ubaidillah terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan juga didapat oleh Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026. Bertanding di Jyske Bank Arena, Odense, Selasa (13/10/2026) malam WIB, Ubed harus mengakui keunggulan wakil Kanada itu dengan skor 8-21, 18-21.

Setelah kalah telak pada gim pertama, Ubed memberi

perlawanan yang lebih ketat pada gim kedua. Meski sempat empat kali menunda kemenangan Lai yang sudah mencapai match point, Ubed pada akhirnya tetap

kalah.

Dari nomor ganda putra, Raymond/Joaquin juga menelan kekalahan straight game. Menghadapi wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy, Raymond/Joaquin kalah dengan skor 19-21, 17-21.

Raymond/Joaquin sempat tertinggal 8-18 dari Lane/

Vendy pada gim pertama.

Namun, meski sudah mengejar sampai 19-20, Raymond/

Joaquin tak mampu membendung lawan.

Pada gim kedua, Raymond/Joaquin selalu tertinggal sejak awal. Mereka pada akhirnya kalah dari unggulan kedelapan itu setelah bertanding selama 37 menit.

Dengan demikian, tidak ada satu pun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026, Selasa (13/10/2026). Pada hari kedua, Rabu (14/10/2026), akan ada delapan wakil Merah Putih yang bertanding.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

